

Analisis Kemampuan Keuangan di Provinsi Kalimantan Tengah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah

Financial Capability Analysis in Central Kalimantan Province
Before and After Regional Autonomy

David Antoni. P¹., Marhot H. Siregar², Sufridson Heno³

¹Undergraduate Students of the Department of Economic, University of Palangka Raya
^{2&3}Department of Economics, Economics and Business Faculty, University of Palangka Raya

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah otonomi daerah, elastisitas PAD sebelum dan sesudah otonomi daerah, *share* PAD sebelum dan sesudah otonomi daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan metode analisis *Paired Sample t-Test* yang merupakan uji beda sampel berpasangan yang digunakan hanya untuk rumusan masalah mengenai Indeks Kemampuan Keuangan sebelum dan sesudah otonomi daerah. Hasil Penelitian menunjukkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) yang terdiri dari pertumbuhan PAD, elastisitas PAD, dan *share* PAD pada tahun 1999 dan 2006 terlihat perbedaan yang fluktuatif. Sedangkan berdasarkan dari nilai IKK menunjukkan rata-rata nilai IKK dari 6 kabupaten/kota pengamatan untuk tahun 1999 dan tahun 2006 masing-masing 2.818 dan 2.758 dengan standar deviasi masing-masing 2382.82 dan 348.28. Nilai IKK tahun 1999 juga menunjukkan variasi yang lebih tinggi dibandingkan nilai IKK tahun 2006. Selain itu pertumbuhan PAD, elastisitas PAD sebelum dan sesudah otonomi daerah tahun 1999 dan tahun 2006 di 6 (enam) kabupaten induk menunjukkan elastisitas yang fluktuatif atau tidak signifikan. *Share* PAD sebelum dan sesudah otonomi daerah tahun 1999 dan tahun 2006 di 6 (enam) kabupaten induk menunjukkan hasil yang signifikan. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) sebelum dan sesudah otonomi daerah di tahun 1999 dan tahun 2006 menunjukkan hasil yang cukup lemah atau tidak signifikan. Hal ini disebabkan pertumbuhan PAD, elastisitas PAD, dan *share* PAD yang bersifat fluktuatif dan tidak terlihat secara nyata bahwa peningkatan terjadi setiap tahun. Akhirnya bagi 6 (enam) kabupaten/kota induk di Provinsi Kalimantan Tengah kemampuan keuangannya masih rendah, sehingga perlu mendapat perhatian dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan membawa dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan antara lain dengan membangun sistem berbasis kinerja penyusunan PAD, serta peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci: *pertumbuhan PAD, elastisitas PAD, share PAD, IKK daerah*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the growth of local original income before and after regional autonomy, the elasticity of local original income before and after regional autonomy, share of regional original income before and after regional autonomy, and regional financial capacity index before and after regional autonomy. This study uses the Paired Sample t-Test

analysis method which is a different paired sample test which is used only for the formulation of the problem regarding the Financial Capability Index before and after regional autonomy. The results of the study show that the regional financial capacity index consisting of growth in local revenues, elasticity of local revenue, and share of local revenue in 1999 and 2006 showed fluctuating differences. While based on the financial ability index value shows the average financial capability index of the 6 districts / cities of observation for 1999 and 2006, respectively 2.818 and 2,758 with standard deviations of 2382.82 and 348.28, respectively. The 1999 financial capability index also shows a higher variation compared to the value of the financial ability index in 2006. In addition, the growth of regional original income, local revenue elasticity before and after regional autonomy in 1999 and 2006 in 6 (six) parent districts shows elasticity fluctuating or insignificant. Share of local revenue before and after regional autonomy in 1999 and 2006 in 6 (six) main districts showed significant results. The financial ability index before and after regional autonomy in 1999 and 2006 showed fairly weak or insignificant results. This is due to the growth of local revenue, elasticity of local revenue, and fluctuating share of regional revenue and it does not appear that the increase occurs every year. Finally, for 6 (six) regencies / parent cities in Central Kalimantan Province their financial capacity is still low, so they need attention in terms of regional financial management and have an impact on improving the welfare of the community. These efforts can be carried out, among others, by building a performance-based system for compiling local revenues, as well as increasing human resources in the area of regional financial management.

Key words: *growth in regional original income, local revenue elasticity, share of regional original income, regional financial capacity index*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan suatu proses perubahan yang terus-menerus di lakukan untuk menuju perbaikan disegala bidang kehidupan masyarakat dengan berdasarkan pada seperangkat nilai yang dianut, yang menuntun masyarakat untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Pembangunan disini lebih diarahkan pada pembangunan potensi, inisiatif, daya kreasi, dan kepribadian dari setiap warga masyarakat. Dengan pembangunan, masyarakat diharapkan semakin mampu mengelola alam bagi peningkatan kesejahteraannya. Pembangunan menuntut

orientasi masa depan bagi kelestarian manusia dan alam.

Pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pembangunan yang harus searah dengan tujuan pembangunan nasional. Adapun tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya demi terwujudnya suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Jangka Panjang (RPJP) disebutkan bahwa pembangunan daerah

sebagai bagian dari pembangunan nasional direncanakan untuk memacu pemerataan pembangunan, peningkatan mutu kesehatan, keamanan, dan lain-lain.

Dalam menghadapi perkembangan keadaan dan tantangan persaingan global serta tuntutan reformasi, diperlukan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi bergeser ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah ditentukan oleh berbagai faktor, salah satunya ialah kinerja dari Pemerintah Daerah. Walaupun kinerja pemerintah daerah bukanlah faktor yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah, namun perlu perhatian dan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dapat ditarik hubungan sebab-akibat yang cukup signifikan (Darise,2007). Antara kedua kondisi tersebut saling memengaruhi, selain implementasi otonomi daerah dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah.

Pemerintah daerah di Indonesia telah mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, dengan mendekatkan pembuatan keputusan ke

daerah, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pembangunan ekonominya sendiri. Pemberlakuan otonomi daerah juga berarti pemerintah daerah harus memiliki rencana ekonomi daerah yang baik untuk menyediakan kesejahteraan bagi penduduknya. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yaitu tentang Pemerintah Daerah, membawa angin segar bagi daerah untuk dapat menggali dan mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri. Sehingga kemampuan keuangan setiap daerah secara bertahap mengalami peningkatan.

Berdasarkan Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Dearah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Republik Indonesia. Otonomi daerah ini merupakan fenomena politis yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi dan demokrasi, apalagi jika dikaitkan dengan tantangan masa depan memasuki era perdagangan bebas yang antara lain ditandai dengan tumbuhnya berbagai bentuk kerja sama regional, perubahan pola atau sistem informasi global.

Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan salah satu daerah terluas yang berada di pulau Kalimantan dibentuk pada tanggal 23 Mei 1957. Sebelumnya Provinsi Kalimantan Tengah tergabung dalam Provinsi Kalimantan. Sebelum pemekaran, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 6 (enam) kabupaten/kota yaitu: Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, Barito Utara, Barito Selatan dan Kota Palangkaraya. Pada tahun 2002 setelah diberlakukannya otonomi daerah, Provinsi Kalimantan Tengah dimekarkan menjadi 14 (empat belas) kabupaten/kota berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 2002 yaitu Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur.

Untuk mengetahui perkembangan kemampuan keuangan daerah salah satunya adalah PAD, karena setiap daerah dapat meningkatkan kemampuannya transfer dari pemerintah pusat. Pertumbuhan PAD di Kalimantan Tengah di 6 (enam) kabupaten/kota induk tampak bervariasi sebelum pemberlakuan otonomi daerah pada tahun 1998.

Pertumbuhan PAD di Kalimantan Tengah di 6 (enam) kabupaten/kota induk

bervariasi sesudah otonomi daerah pada tahun 2004-2006 dan mendominasi PAD tertinggi yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebelum dan sesudah pemberlakuan otonomi daerah selama dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1999 selalu mengalami kenaikan.

Kemampuan perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dapat juga dilihat dari laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan hasil yang fluktuatif dan tidak merata setelah otonomi daerah jika dilihat dari tahun 1995-2006.

Keberhasilan implementasi kesejahteraan masyarakat merupakan tugas dari Pembangunan Nasional sejalan dengan semangat otonomi daerah, keberhasilan pembangunan tanpa menyatakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan membuat kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel diduga dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara

professional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pertimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Dari uraian diatas, maka peneliti ingin menganalisis tentang kemampuan keuangan 6 (enam) kabupaten/kota induk di Provinsi Kalimantan Tengah sebelum dan sesudah pemberlakuan otonomi daerah yang diukur dengan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) di Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengambil judul: “**Analisis Kemampuan Keuangan di Provinsi Kalimantan Tengah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah**”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *outus* yang berarti sendiri dan *nomos* berarti undang-undang. Pelaksanaan otonomi daerah bukan saja berdasarkan pada aturan hukum, melainkan juga sebagai penerapan tuntutan globalisasi yang wajib diberdayakan. Caranya dengan memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, utamanya dalam menggali, mengatur, dan memanfaatkan potensi besar yang ada di masing-masing daerah. Konsep sentralisasi

menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik yakni sebagai kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah.

Prinsip -Prinsip Otonomi Dearah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah menitik beratkan pada Daerah Tingkat II sesuai dengan tujuannya, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan umum undang-undang nomor 32 tahun 2004.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka dapat diartikan bahwa peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah cukup besar. Terutama dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat, akan tetapi masih tetap dalam kerangka memperkokoh negara kesatuan sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

2.2. Pemerintah Daerah

Berikut ini akan dijelaskan lebih jauh mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu :

- 1) Asas Desentralisasi. Menurut Koesoemahatmad (1978), Desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-

daerah yang mengurus urusan rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom).

- 2) Asas Dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.
- 3) Asas Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan adalah penugasan pemerintah daerah, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban memberikan laporan dari hasil pelaksanaan dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

2.3. Wewenang Pemerintah Daerah

Menurut (Saragih Panglima Juli, 2003) hakikat otonomi daerah adalah adanya hak untuk mengurus dan menjalankan sendiri apa yang menjadi bagian atau wewenangnya.

Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana di atur dalam undang-undang adalah sebagai berikut (Saragih Panglima Juli, 2005):

- 1) Kewenangan pemerintah yang bersifat lintas kabupaten/kota.
- 2) Kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu, seperti

perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan, alokasi SDM potensial, penelitian, pelabuhan regional, lingkungan hidup, proporsi, penanganan penyakit menular, hama tanaman dan perencanaan tata ruang provinsi.

- 3) Kewenangan yang tidak atau belum dapat dilakukan oleh kabupaten/kota.
- 4) Kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur.

Berdasarkan undang-undang otonomi daerah, kewenangan pemerintah provinsi terdiri dari: kewenangan berdasarkan asas desentralisasi dan kewenangan berdasarkan asas dekonsentrasi.

2.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kebijakan fiskal biasanya diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tingkat nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tingkat daerah. Dalam struktur APBD terdiri dari :

- 1) Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Daerah, Dana Perimbangan,

dan Pendapatan Daerah Lain-Lain Yang Sah.

- 2) Bagian Belanja Daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah.
- 3) Bagian Pembiayaan Daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus yang dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis pembayaran.

2.5. Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mardiasmo (2002) Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, maupun melayani kebutuhan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Tujuan pengukuran kemampuan keuangan daerah, antara lain:

- 1) Untuk memperbaiki kemampuan pemerintah, artinya pemerintah harus fokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.
- 2) Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.6. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan daerah artinya seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat.

Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Indeks kemampuan keuangan menggambarkan tingkat kemampuan keuangan daerah dengan menyusun tiga komponen yakni rata-rata hitung dari indeks pertumbuhan (*Growth*), indeks elastisitas, dan indeks peran (*share*).

- 1) Pertumbuhan PAD (*Growht*). Memperlihatkan bagaimana pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan PAD (X_G)

$$= \frac{PAD_n - PAD_{n-i}}{PAD_{n-i}} \times 100$$

Keterangan:

PAD_t = Pendapatan asli Daerah t

PAD_{t-1} = Pendapatan asli Daerah t-1

- 2) Elastisitas PAD. Elastisitas pendapatan adalah suatu perubahan (peningkatan/penurunan) daripada pendapatan suatu negara yang akan berpengaruh terhadap permintaan barang dan besarnya pengaruh perubahan tersebut diukur dengan pendapatan.

Elastisitas PAD (X_E)

$$= \frac{\text{pertumbuhan PAD}}{\text{pertumbuhan PDRB}} \times 100$$

- 3) *Share* PAD. *Share* pendapatan asli daerah indikator ukuran terhadap total belanja dalam membiayai kegiatan rutin, belanja pembangunan daerah, biaya langsung dan tidak langsung.

***Share* PAD (X_S)**

$$= \frac{\text{total PAD}}{\text{belanja daerah}} \times 100$$

- 4) Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dapat dianalisis dengan cara menghitung indeks kemampuan keuangan dengan rumus:

$$IKK = \frac{X_G + X_E + X_S}{3}$$

Keterangan:

X_G = Indeks Pertumbuhan (PAD)

X_E = Indeks Elastisitas (PAD)

X_S = Indeks *Share* (PAD)

Kategori Indeks Kemampuan Keuangan

Indeks Kemampuan Keuangan	Klarifikasi
<0,00	Sangat Rendah
0,00 – 0,33	Rendah
0,34 – 0,43	Sedang
0,44 – 1,00	Tinggi

Sumber: Bappenas, 2003

Perbedaan terletak pada lokasi penelitian yaitu di Provinsi Kalimantan Tengah dan data yang diambil sebagai sampel adalah 6 (enam) kabupaten/kota induk sebelum pemekaran otonomi daerah yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, Barito Selatan, Barito Utara, Palangka Raya. Perbedaan lainnya adalah pada alat analisis yang menggunakan *Paired Sample t-Test*.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau catatan-catatan tentang program kerja dan realisasinya serta data-data lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis *Paired Sample t-Test* yang merupakan uji beda dua sampel berpasangan yang digunakan hanya untuk rumusan

masalah mengenai Indeks Kemampuan Keuangan Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. Apabila *Paired Sample t-Test* tidak memberikan pengaruh, maka perbedaan rata-rata adalah nol. Untuk melakukan uji *t-test* diperlukan data berskala interval atau rasio (*scale*).

Berikut model analisis *Paired Sample t-Test* yaitu:

$$Sd^2 = 1/ (n - 1) \times [\text{total} (d - d \text{ rata-rata})]$$

$$t = \frac{-d - d0}{Sd/\sqrt{n}}$$

Keterangan :

t = tahun pengamatan tahun 1999 dan tahun 2006.

-d = rata-rata perbedaan antara pengamatan sebelum dan sesudah.

Sd = standart deviasi

n = jumlah sampel pengamatan berpasangan

Uji Statistik t (t-test)

Uji statistik t (t-test) merupakan salah satu uji statistik yang lazim digunakan dalam penelitian kuantitatif. Uji t digunakan ketika informasi mengenai nilai *variance* (ragam) populasi yang tidak diketahui.

Uji t dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu uji t yang digunakan untuk pengujian

hipotesis 1 sampel dan uji t yang digunakan untuk pengujian hipotesis 2 sampel. Bila dihubungkan dengan kebebasan (*independent*) sampel yang digunakan (khusus bagi uji dengan 2 sampel), maka uji t dibagi lagi menjadi 2, yaitu uji t untuk sampel bebas (*independent* dan uji t untuk sampel berpasangan (*paired*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Letak Geografis dan Wilayah

Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ibukota Palangka Raya terletak antara 0⁰- 45⁰ Lintang Utara 3⁰- 30⁰ Lintang Selatan dan 110⁰ -115⁰ Bujur Timur. Kalimantan Tengah juga memiliki luas 153.564,00 km atau 8,04 % luas Indonesia.

4.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah

Pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan Tengah tahun 2006 yang ditunjukkan oleh kenaikan Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 adalah sebesar 5,48%. Pertumbuhan sebesar ini lebih rendah dari yang dicapai tahun 2005 yaitu sebesar 5,84 %.

4.3. PDRB Provinsi Kalimantan Tengah dan Laju Pertumbuhan Pada Tahun 1997 – 2006

Pertumbuhan ekonomi dilihat berdasarkan harga konstan provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 1997 sampai

2006, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 1997 sebesar 6,29% sedangkan terendah pada tahun 1998 sebesar 6,92%. Perekonomian Kalimantan Tengah pada tahun 1999 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

4.4. PDRB Kalimantan Tengah Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 1998 – 2006

PDRB Kalimantan Tengah atas dasar harga konstan tahun 1998 dan 1999 menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa sektor listrik dan air bersih merupakan sektor terkecil sumbangannya. PDRB atas harga konstan sebesar Rp.13.910,89 milyar; Rp.14.997,08 milyar dan Rp. 16.336,31. Sementara PDRB tahun 1997-1999 sektor penyumbang terbesar menurut lapangan usaha yaitu sektor pertanian sebesar Rp. 1.587.393,82 milyar; Rp.1.524.062,23 milyar dan Rp. 1.524.621,94 milyar.

PDRB atas dasar konstan tahun 2005 dari sector terkecil sebesar Rp. 67.884,72 milyar, dan tahun 2006 Rp. 68.874,92 milyar. Sementara PDRB tahun 2005-2006 sektor penyumbang terbesar pada tahun 2005 sebesar Rp. 5.296.808,32 milyar dan tahun 2006 sebesar Rp.5.575.031,85 milyar.

4.5. PDRB 6 (enam) Kabupaten/Kota Induk Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 1999 dan 2006

PDRB 6 (enam) kabupaten/kota induk atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa PDRB tertinggi pada tahun 1999 dimiliki Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 1.032.524.230 milyar dan PDRB terendah yaitu Barito Utara sebesar Rp. 399.940.118 milyar. Sedangkan tahun 2006 PDRB tertinggi adalah Kotawaringin Barat sebesar Rp. 3.184.205.003 milyar dan PDRB terendah dimiliki oleh Kabupaten Kapuas sebesar Rp. 1.141.673.681 milyar

4.6. PAD 6 Kabupaten/Kota Sebelum Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 1998 – 1999

Pada tahun 1998 Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dimiliki kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp. 4.553.339, dan pendapatan terkecil dimiliki oleh Kapuas sebesar Rp. 1.267.647. Sementara pada tahun 1999 PAD terbesar dimiliki oleh Palangka Raya sebesar Rp. 3.799.910 dn PAD terkecil dimiliki oleh Kabupaten Barito Utara sebesar Rp.998.104.

4.7. PAD 6 Kabupaten /Kota Sesudah Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005-2006

Pada tahun 2005 PAD terbesar dimiliki oleh Kabupaten Kotawaringin

Timur sebesar Rp. 26.776.196.640, dan PAD terkecil dimiliki oleh Kabupaten Barito Utara sebesar Rp. 6.297.921.385. Sementara tahun 2006 PAD terbesar dimiliki oleh Kotawaringin Barat sebesar Rp. 30.274.828.311, dan PAD terkecil dimiliki oleh Kabupaten Barito Selatan sebesar Rp. 12.273.611.280.

4.8. Belanja Daerah 6 (enam) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1999 dan 2006

Belanja tertinggi pada kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Tengah tahun 1999 adalah Kabupaten Kapuas sebesar Rp. 96.372.536 dan belanja terendah terdapat pada Kota Palangka Raya sebesar Rp. 41.469.295. Sementara tahun 2006 belanja tertinggi terdapat pada Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp. 335.520.908 dan belanja terendah terdapat pada Kabupaten Barito Selatan sebesar Rp. 189.457.020.

4.9. Pertumbuhan PAD tahun 1999 dan 2006 dalam persen (%)

Kabupaten/Kota	1999 (%)	2006 (%)
Kotawaringin Barat	7,23	15,31
Kotawaringin Timur	-24,54	7,09

Kapuas	4,038	-11,17
Barito Selatan	-23,7646	75,4
Barito Utara	-32,7646	81,02
Palangka Raya	65,37	5,92

4.10. Elastisitas PAD pada tahun 1999 dan 2006 dalam persen (%)

Kabupaten/Kota	1999 (%)	2006 (%)
Kotawaringin Barat	5,16	5,10
Kotawaringin Timur	2,72	1,18
Kapuas	4,03	1,11
Barito Selatan	2,57	1,93
Kabupaten/Kota	1999 (%)	2006 (%)
Barito Utara	1,42	1,93
Palangka Raya	8,17	8,70

4.11. Share PAD tahun 1999 dan 2006 dalam persen (%)

Kabupaten/Kota	1999 (%)	2006 (%)
Kotawaringin Barat	3,803	12,569
Kotawaringin Timur	3,571	8,546
Kapuas	1,368	4,718
Barito Selatan	1,928	6,478
Barito Utara	1,632	5,765
Palangka Raya	9,165	5,867

4.12. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) tahun 1999 dan 2006 dalam persen (%)

Kabupaten/Kota	1999 (%)	2006 (%)
Kotawaringin Barat	781,094	88,169

Kotawaringin Timur	2.645,696	45,065
Kapuas	436,010	72,462
Barito Selatan	2.482,169	523,996
Barito Utara	3.512,020	878,191
Palangka Raya	7.053,875	47,205

4.13. Uji Statistik-t Kemampuan Keuangan 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah

Uji statistic -t berpasangan (Paired t-Test) digunakan untuk melihat secara statistik apakah pemberlakuan otonomi daerah signifikan memengaruhi kemampuan keuangan 19 provinsi yang diamati.

Rata-rata nilai IKK dari 6 (enam) kabupaten/kota pada tahun 1999 dan tahun 2006 masing-masing 2.818 dan 2.758 dengan standar deviasiasi masing-masing 2382.84 dan 348.28. Nilai IKK tahun 1999 juga menunjukkan variasi yang lebih tinggi dari tahun 2006.

4.14. Interpretasi

Berdasarkan dari hasil analisis yang didapat dengan menggunakan analisis Paired t-Test dapat dijelaskan bahwa hasil Paired sample t-test menunjukkan nilai standar deviasi IKK sebesar 2385.402751 dan hasil hipotesis uji t sebesar 2.661 yang artinya ada perbedaan nilai IKK yang dikaitkan dengan pelaksanaan sebelum dan sesudah otonomi

daerah tetapi masih dianggap lemah dan kurang signifikan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah tahun 1999 dan tahun 2006 di 6 (enam) kabupaten/kota induk menunjukkan PAD yang tidak signifikan; (2) Elastisitas PAD sebelum dan sesudah otonomi daerah tahun 1999 dan tahun 2006 di 6 (enam) kabupaten/kota induk menunjukkan elastisitas yang fluktuatif atau tidak signifikan; (3) *Share* PAD sebelum dan sesudah tahun 1999 dan tahun 2006 di 6 (enam) kabupaten/kota induk menunjukkan hasil yang signifikan; dan (4) Indeks kemampuan keuangan (IKK) sebelum dan sesudah tahun 1999 dan tahun 2006 di 6 (enam) kabupaten/kota induk menunjukkan hasil yang cukup lemah atau tidak signifikan karena disebabkan pertumbuhan PAD, elastisitas PAD dan *share* PAD bersifat fluktuatif dan tidak terlihat secara nyata adanya peningkatan terjadi setiap tahun.

Adapun saran bagi penelitian ini sebagai berikut: (1) Pada 6 (enam) kabupaten/kota induk di Provinsi Kalimantan Tengah kemampuan keuangannya masih rendah, sehingga perlu mendapat perhatian dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan

membawa dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan membangun system manajemen dalam pengelolaan keuangan daerah, penerapan sistem berbasis penyusun PAD, serta peningkatan SDM dalam bidang pengelolaan keuangan daerah; (2) Kabupaten/kota dengan kemampuan keuangan rendah perlu melakukan revitalisasi lembaga-lembaga terkait, termasuk desentralisasi kewenangan perjanjian investasi, kebijakan pemberian fasilitas insentif kepada investor yang lebih menarik, peraturan perundang-undangan yang memihak investor serta pembangunan sarana dan prasarana; (3) Menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor baik lokal maupun asing guna menanamkan modalnya di 6 (enam) kabupaten/kota, sehingga dapat meningkatkan PDRB; dan (4) Perusahaan Daerah (BUMN) yang merupakan salah satu sumber pemasok dana ke kas daerah harus lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kontribusi bagi PAD juga meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Priyo Hari, dan Wiryawan. 2012. Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali).

Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin. Vol.XXI No.1

Aryanto, Rudi. 2011. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah*. Vol.III No 2.

Anonim, Peraturan Pemerintah RI No.32 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Anonim, Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah Dalam Angka 2017. Boediono. 1981. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi – UGM.

Dariwardani Ni Made Inna dan Amani Siti Noor. 2010. Kinerja di Indonesia Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Negara STIA*. Vol1(1)

Deddy K. Bappenas. 2003. Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.

Djaenuri Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Daerah Pusat-Daerah*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Darise Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Gorontalo: Penerbit PT. Indeks.

Halim Abdul. 2007. *Seri Bunga Rampai Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.

- Haris Syamsudin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit LIPI Press.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit PT. Gelora Aksara Pratama.
- Mahmesah D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sarwono Jonatan. 2010. *Belajar Statistik Menjadi Mudah dan Cepat, PASW STATISTIC 18*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Supranto, J. 1984. *Ekonometrik*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi–UI.
- Sadono Sukirno. 1981). *Pengantar Ekonomi Makro Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Fakultas–UI.
- Widjaja HAW. 2001. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Yudoyono Bambang. 2003. *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Angkatan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Yuliati. 2001. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.